BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 001/PP.01.02/K.MU-10/11/2026

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI "PELITA" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, diperlukan sarana penerimaan dan pengelolaan pengaduan yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis daring (web) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

b. bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi dan pengaduan dugaan pelanggaran serta mendukung proses pencatatan, pengadministrasian, identifikasi, verifikasi awal, pemantauan, dan pendokumentasian tindak lanjut pengaduan, perlu ditetapkan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web);

c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, telah disepakati penetapan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" sebagai sarana pendukung pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 007/RT.02/K.MU-10/11/2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Penetapan Aplikasi serta Staf Pengelola Aplikasi Sistem Pemantauan dan Koordinasi Pengawasan "SIPANTAU Pengawasan" dan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring *Web*.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI "PELITA" BERBASIS DARING (WEB) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi "PELITA" Berbasis Daring (Web) sebagai sarana pendukung penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, melalui Laman : PELITA - Admin Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai sarana untuk menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pengaduan, informasi, serta keterangan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan. Aplikasi ini juga digunakan untuk mendukung proses identifikasi, verifikasi awal, pemantauan tindak lanjut, pendokumentasian, dan penyajian rekapitulasi pengaduan sebagai bahan pendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

KETIGA : Ruang lingkup penggunaan Aplikasi "PELITA" meliputi penerimaan informasi dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan, pencatatan identitas dan keterangan Pengadu, uraian peristiwa yang diadukan, waktu dan tempat kejadian,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta dokumen atau bukti pendukung lainnya yang disampaikan melalui aplikasi.

KEEMPAT : Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh Unit Kerja di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 November 2026

KETUA

AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).